

PENGARUH PAJAK HOTEL, PDRB, TINGKAT HUNIAN HOTEL, JUMLAH WISATAWAN, COVID-19 TERHADAP PAD

Tiara Rachellya Chrisanta Jomaki*, Devanto Shasta Pratomo
Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya,
Indonesia

DITERIMA

Agustus 2023

DIREVISI

September 2023

DISETUJUI

Oktober 2023



Abstract: *The regional autonomy system that has been in effect in Indonesia since 1999 has given each region the freedom to organize and manage its own government affairs, including regional financial affairs. Malang Raya, which consists of 3 regions, namely Malang City, Batu City, and Malang Regency has enormous tourism potential to increase PAD. The purpose of this study was to determine the effect of hotel taxes, the GRDP of the accommodation and food and drink provider sector, hotel occupancy rates, the number of tourists, and the COVID-19 pandemic on PAD in Malang Raya. This study uses a descriptive quantitative method using secondary data obtained through the Central Bureau of Statistics in the three regions of Greater Malang. The analysis technique of this research was done by using panel data regression. Based on the results of this study, the results of the food and beverage GRDP, hotel occupancy rates, and the number of tourists partially had a positive and significant effect on PAD, while hotel taxes had a negative and significant effect on PAD, and the COVID-19 pandemic resulted in a decrease in PAD in 2020. However, in terms of Simultaneously, hotel taxes, food and beverage GRDP, hotel occupancy rates, the number of tourists, and the Covid-19 pandemic have an effect on PAD.*

Keywords: *Hotel tax; number of tourists; locally-generated revenue; hotel occupancy rate; GRDP; the covid-19 pandemic*

Abstrak: Sistem otonomi daerah yang sudah berlaku di Indonesia sejak tahun 1999 telah memberikan kebebasan kepada setiap daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan tidak terkecuali urusan keuangan daerah. Malang Raya yang terdiri dari 3 daerah yaitu Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang memiliki potensi pariwisata yang sangat besar untuk meningkatkan PAD. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pajak hotel, PDRB sektor penyedia akomodasi dan makan minum (mamin), tingkat hunian hotel, jumlah wisatawan, dan pandemi covid-19 terhadap PAD di Malang Raya. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan menggunakan data sekunder yang didapatkan melalui Badan Pusat Statistik di ketiga daerah Malang Raya. Teknik analisis penelitian ini dilakukan dengan regresi data panel. Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh hasil PDRB mamin, tingkat hunian hotel, dan jumlah wisatawan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, sedangkan pajak hotel berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PAD, dan pandemi covid-19 mengakibatkan penurunan PAD di tahun 2020. Namun, secara simultan pajak hotel, PDRB mamin, tingkat hunian hotel, jumlah wisatawan, dan pandemi covid-19 berpengaruh terhadap PAD.

Kata kunci: Pajak hotel; jumlah wisatawan; pendapatan asli daerah; tingkat hunian hotel; PDRB; pandemi covid-19.

INDEKSASI

Google Scholar

PENULIS**KORESPONDENSI**Tiara Rachellya Chrisanta
Jomaki

tiarajomaa@gmail.com

Fakultas Ekonomi dan
Bisnis, Universitas
Brawijaya, Indonesia**Cite this as:**

Jomaki, T. R. C. & Pratomo, D. S. 2023. Pengaruh Pajak Hotel, PDRB, Tingkat Hunian Hotel, Jumlah Wisatawan, Covid-19 Terhadap PAD. Journal of Development Economic and Social Studies. Volume 02, Number 4, Pages 939-951. Universitas Brawijaya. <http://dx.doi.org/10.21776/jdess.2023.02.4.19>

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kesatuan yang menganut sistem otonomi daerah, yang diberlakukan di Indonesia pada saat reformasi sejak tahun 1999. Otonomi daerah adalah penyerahan hak, kekuasaan, dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus daerah masing-masing (Azhari & Negoro, 2020). Sebagai negara kepulauan maka otonomi daerah penting untuk diterapkan di Indonesia karena akan memudahkan pemerintah untuk menjangkau masing-masing daerah di Indonesia agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pelayanan kepada masyarakat (Willy, 2020). Berlakunya otonomi di Indonesia menjadikan masing-masing daerah berhak untuk mengatur setiap wewenang dan menjalankan urusan pemerintah yang telah menjadi tugas setiap daerah. Dalam melakukan seluruh urusan pemerintah setiap daerah memerlukan sumber penerimaan. Penerimaan daerah diberikan oleh pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Terdapat PAD dalam setiap APBD yang dapat digunakan untuk membiayai setiap pelaksanaan kegiatan otonomi daerah berdasarkan potensi masing-masing daerah sebagai wujud nyata desentralisasi (Sihombing, 2020). PAD dapat diperoleh dan dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berasal dari pendapatan pajak dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Lasmini & Astuti (2019) menyatakan bahwa sumber utama dalam PAD adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Menurut Lina (2017), terdapat beberapa komponen yang dapat memengaruhi PAD selain pajak daerah yaitu misalnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut Adriani (2018), PDRB dapat menggambarkan kondisi pertumbuhan ekonomi dan bagaimana kondisi arah pembangunan dari suatu daerah. Semakin besar perolehan PDRB di suatu daerah maka semakin bertambah juga potensi penerimaan yang diperoleh daerah. Menurut Willy (2020), jumlah sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia tidak terbatas dan setiap daerah di Indonesia memiliki keindahan alam yang berbeda-beda. Dengan banyaknya wisatawan

yang datang ke Indonesia, maka Indonesia harus menyediakan akomodasi yang layak, salah satunya adalah hotel atau tempat penginapan. Hal tersebut akan mengakibatkan wisatawan yang menginap di hotel akan dikenakan pajak sehingga pajak hotel tersebut mampu meningkatkan penerimaan PAD. Menurut Sabrina & Mudzhalifah (2018), terdapat beberapa aspek dalam sektor pariwisata yang mampu meningkatkan penerimaan daerah yaitu banyaknya wisatawan lokal maupun mancanegara yang mendatangi suatu daerah untuk berwisata dan tingkat hunian yang ada pada setiap hotel. Maka dari itu, tingkat hunian hotel juga berpotensi dalam meningkatkan penerimaan PAD (Suastika & Yasa, 2015). Malang Raya adalah bagian dari Jawa Timur yang dibagi menjadi tiga wilayah yaitu Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang. Ketiga wilayah ini memiliki potensi di dalam sektor pariwisata karena kekayaan alam wisata yang tersedia (Simanjuntak et al., 2016). Dengan banyaknya ragam potensi wisata yang ada, maka wilayah Malang Raya menyodorkan berbagai macam destinasi untuk berwisata. Destinasi pariwisata yang dimiliki oleh Malang Raya adalah sebanyak 241 destinasi yang tersebar di 39 kecamatan. (Simanjuntak et al., 2016). Hal tersebut yang mengundang wisatawan baik lokal dan non-lokal untuk mendatangi destinasi wisata di Malang Raya. Semakin banyaknya wisatawan yang berkunjung akan membuat sektor pariwisata memiliki potensi dalam menyumbang besarnya PAD sehingga jumlah wisatawan memberikan partisipasi yang positif dalam PAD (Suastika & Yasa, 2015). Sehingga dari latar belakan tersebut penelitian ini akan meneliti tentang pengaruh pajak hotel, PDRB sektoral, tingkat hunian hotel, dan jumlah wisatawan terhadap PAD di Malang Raya.

Dengan banyaknya destinasi wisata di Malang Raya akan mengundang wisatawan untuk datang berkunjung ke Malang Raya. Hal tersebut dapat dibuktikan dari data jumlah wisatawan Malang Raya mulai tahun 2010—2020 yang relatif meningkat. Namun, terjadi penurunan di tahun 2020 karena terjadinya pandemi covid-19. Data tersebut dapat diperlihatkan melalui gambar berikut:

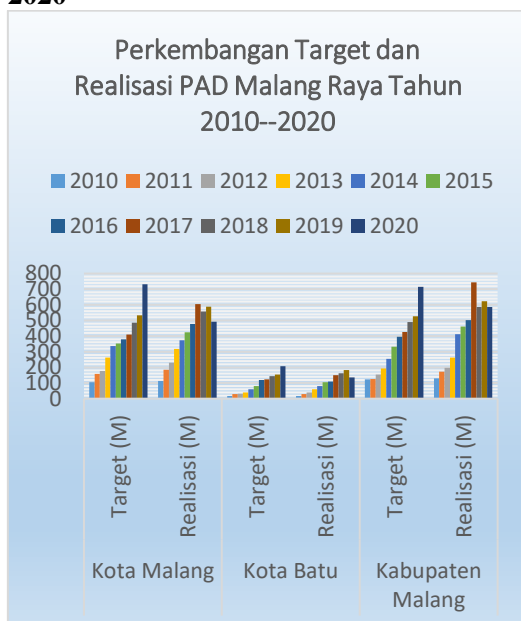
Gambar 1. Perkembangan Wisatawan Malang Raya Tahun 2010—2020



Sumber: BPS Kota Malang, BPS Kota Batu, BPS Kab. Malang

Gambar 1 menunjukkan bahwa jumlah wisatawan di Malang Raya relatif meningkat dari tahun 2010—2019 namun terjadi penurunan di tahun 2020 karena terjadi pandemi. Dengan latar belakang Malang Raya yang berpotensi dalam sektor pariwisata, maka setiap pemerintah daerah mampu untuk menggunakan potensi yang sudah dimiliki Malang Raya dengan maksimal. Dengan begitu, PAD di Malang Raya bisa dimaksimalkan dengan memanfaatkan potensi yang ada. Berikut adalah perkembangan PAD di 3 daerah Malang Raya:

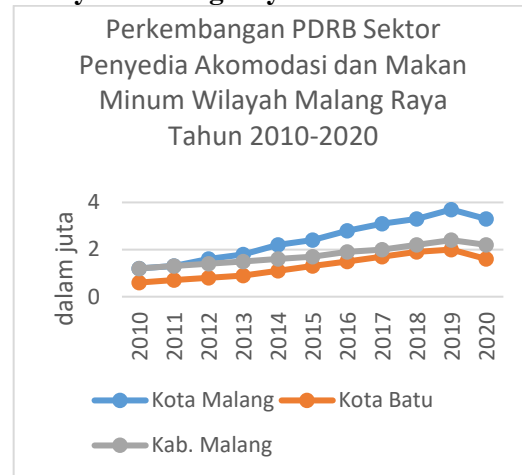
Gambar 2. Perkembangan Target Dan Realisasi Pad Malang Raya Tahun 2010—2020



Sumber: Portal Data Kemenkeu

Gambar 2 menunjukkan bahwa perkembangan target dan realisasi PAD di Malang Raya tahun 2010—2019 terus mengalami peningkatan namun sama halnya dengan jumlah wisatawan, target dan realisasi PAD di ketiga daerah mengalami penurunan karena terjadi pandemi covid-19. Menurut Murib et al. (2018), merujuk pada potensi daerah yang dimiliki oleh Malang Raya maka aktivitas perekonomian dapat dilihat dari PDRB yang diperoleh oleh ketiga daerah di Malang Raya. Berikut adalah perkembangan PDRB sektor mamin di Malang Raya tahun 2010—2020:

Gambar 3. Perkembangan Pdrb Sektor Penyedia Akomodasi Dan Makan Minum Wilayah Malang Raya Tahun 2010—2020



Sumber: BPS Malang Raya

Salah satu sektor unggulan yang sangat berhubungan dengan pariwisata adalah sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Gambar 3 menunjukkan bahwa PDRB sektor Penyedia Akomodasi dan Makan Minum mengalami peningkatan terus menerus mulai tahun 2010 sampai tahun 2019. Namun, sama halnya dengan PAD, karena terjadi Pandemi Covid-19 PDRB di sektor ini pun mengalami penurunan di tahun 2020. Beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pengaruh pajak daerah terhadap PAD diantaranya oleh: Willy (2020) mengkaji tentang Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap PAD di Kota Bandung. Ulasan penelitian yaitu pajak hotel dan pajak restoran memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD dengan arah hubungan positif. Kapang et al., (2019) meneliti tentang Analisis Pengaruh Sektor Pariwisata terhadap PAD di Kota Manado tahun 2007—2012 dengan hasil perolehan

penelitian tingkat hunian hotel berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap PAD. Jumlah wisatawan berpengaruh positif dan tidak signifikan akan PAD. Namun, PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Arraniry (2018) meneliti mengenai Analisis Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap PAD di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2012—2016 dengan hasil penelitian jumlah wisatawan berpengaruh dengan arah positif tetapi tidak signifikan terhadap PAD.

Perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah terletak pada perbedaan lokasi penelitian dimana pada penelitian ini menggunakan wilayah Malang Raya yang terdiri dari Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang, lalu tahun penelitian yaitu tahun 2010—2020. Perbedaan berikutnya juga terletak pada metode penelitian dimana penelitian sebelumnya secara umum banyak menggunakan data time series dengan model analisis regresi linier, sedangkan penelitian ini menggunakan data panel untuk 3 daerah di Malang Raya.

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah informasi terbaru mengenai pengaruh pajak hotel, PDRB sektoral, tingkat hunian hotel, jumlah wisatawan, dan pandemi covid-19 terhadap PAD di Malang Raya. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat untuk mengkaji penerapan teori otonomi daerah di ketiga daerah Malang Raya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak hotel terhadap PAD di Malang Raya, pengaruh PDRB mamin terhadap PAD di Malang Raya, pengaruh tingkat hunian hotel terhadap PAD di Malang Raya, pengaruh jumlah wisatawan terhadap PAD di Malang Raya, dan bagaimana pengaruh terjadinya pandemi covid-19 terhadap PAD di Malang Raya.

KAJIAN PUSTAKA

Otonomi Daerah, Keuangan Daerah, PAD, PDRB

Menurut Horota et al., (2017) otonomi daerah adalah suatu kebijakan dimana penyelenggaraan kegiatan pemerintah pusat yang diberikan kepada pemda. Daerah otonom dikenal karena adanya prinsip yang diletakkan pada UU No 5 tahun 1974 yang menulis peraturan tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah (Pemda). Di Indonesia titik tolak

desentralisasi adalah kabupaten/kota. Hal ini disebabkan karena terdapat tiga dasar pertimbangan yaitu dimensi politik, dimensi administratif, dan kabupaten/kota merupakan daerah “ujung tombak” penerapan pembangunan. Dari ketiga dasar pertimbangan tersebut maka terbentuklah prinsip dari otonomi daerah yaitu otonomi yang jelas, bertanggung jawab, dan dinamis (Kuncoro, 2010). Otonomi daerah memiliki visi yang bergerak dalam 3 ruang lingkup diantaranya politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Pada aspek ekonomi, di satu sisi otonomi daerah wajib menanggung implementasi kebijakan ekonomi nasional agar berjalan dengan baik dan di sisi lain otonomi daerah harus mampu membuka peluang-peluang bagi pemda dalam mengembangkan kebijakan regional sehingga mampu untuk memaksimalkan penggunaan potensi ekonomi yang terdapat di suatu daerah sehingga dapat memajukan infrastruktur daerah yang bisa mengakibatkan meningkatnya perputaran ekonomi. konsep otonomi daerah dalam sektor ekonomi yaitu melakukan peningkatan efisiensi administrasi keuangan daerah dan penataan yang nyata mengenai sumber-sumber pendapatan yang diperoleh negara dan daerah, pengklasifikasian pendapatan yang berasal dari sumber penerimaan seperti dari kekayaan alam, pajak daerah, retribusi daerah, pinjaman serta obligasi daerah (Rosidin, 2019).

Dalam sistem keuangan negara, keuangan daerah adalah bagiannya. Setiap tahun pemerintah daerah akan menerima dana perimbangan dari pemerintah pusat sehingga pemda tidak menanggung pembiayaan sendiri. Hal ini dilakukan sebagai pembagian tugas antara pemerintahan pusat dan daerah dengan dilandasi asas dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan desentralisasi. Hubungan keuangan antara pusat dan daerah merupakan hubungan yang diatur dengan undang-undang.

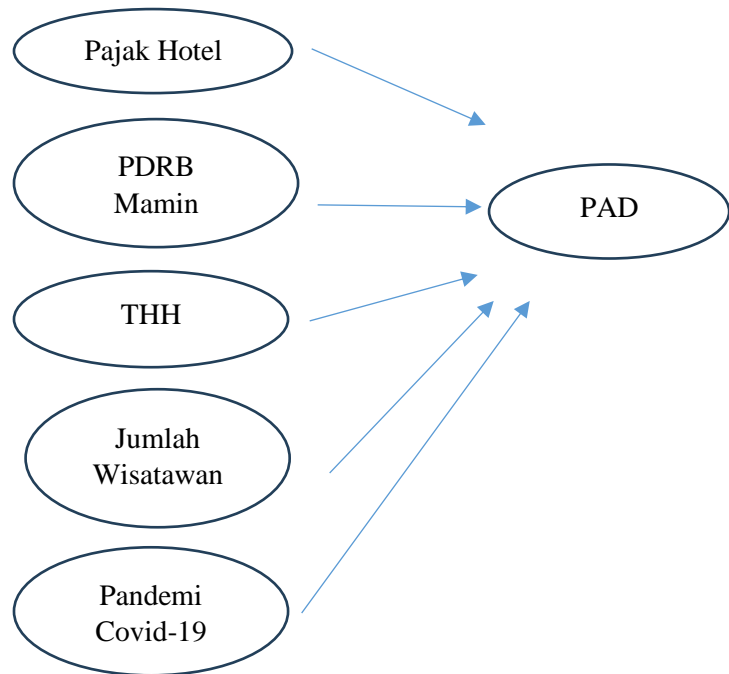
Menurut Wulandari & Iryanie (2017), salah satu komponen dari APBD adalah PAD. Kemandirian suatu daerah dalam mengelola setiap potensi ataupun mengelola keuangan daerah dengan baik dapat dilihat dari bagaimana pemerintah daerah mengelola PAD dengan baik dengan mampu untuk menggali sumber-sumber PAD dimana bisa berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang

dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Menurut Lasmini & Astuti (2019), PAD adalah pendapatan daerah yang sah yang berasal dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan instansi, dan sumber lain yang termasuk dalam PAD yang bersangkutan. Menurut Marita & Saurdana (2019), sumber-sumber tersebut akan ditujukan kepada setiap daerah untuk mendapatkan pendanaan sebagai wujud dari pelaksanaan otonomi daerah. Menurut Biringkanae & Tammu (2021), peningkatan kemampuan keuangan daerah dapat terjadi apabila setiap daerah mampu untuk menggali setiap potensi yang dimiliki daerah yang akan mengakibatkan peningkatan terhadap penerimaan PAD.

Menurut Ramdani et al., (2021), PDRB adalah pendapatan atau balas jasa yang dihasilkan dari potensi yang dimiliki oleh setiap daerah. PDRB juga menunjukkan keadaan pertumbuhan ekonomi di setiap daerah. Semakin besar nilai PDRB yang diperoleh setiap daerah maka semakin baik perekonomian dan daya beli masyarakat maka hal tersebut juga akan berpengaruh kepada kemampuan masyarakat untuk melunasi pajak dan retribusi daerah. Hal tersebut juga akan mengakibatkan meningkatnya PAD di suatu daerah. Oleh karena itu, dengan asumsi PDRB meningkat, maka akan meningkatkan pendapatan provinsi dan dengan demikian pendapatan tersebut dapat digunakan untuk mendukung program-program pembangunan di tahun-tahun mendatang. (Widiyanti & Dewanti, 2017). Menurut BPS (2023), terdapat 3 pendekatan dalam PDRB, yaitu pendekatan melalui faktor produksi dimana PDRB merupakan jumlah nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah selama periode waktu tertentu oleh berbagai unit produksi. Unit produksi dibagi menjadi 9 sektor. Pendekatan kedua adalah pendekatan pendapatan dimana PDRB ialah besarnya balas jasa yang diperoleh faktor produksi di suatu negara pada jangka waktu tertentu. Pendekatan yang ketiga adalah pendekatan melalui sektor pengeluaran PDRB merupakan segala aspek pada permintaan akhir yang meliputi; pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirbala, pengeluaran

konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan inventori, ekspor neto.

Kerangka Pikir Penelitian



Gambar 4. Kerangka Pikir Penelitian

Pengembangan Hipotesis

Hubungan Pajak Hotel terhadap PAD

Salah satu komponen dari pendapatan asli daerah yang memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan adalah pajak daerah. Dengan begitu, pajak daerah harus dikelola dengan baik. Salah satu sektor dalam pajak daerah adalah pajak hotel dimana pajak hotel merupakan pajak layanan yang didapatkan dari hotel. Semakin besar penerimaan yang diperoleh dari pajak hotel maka akan semakin meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah (Rochimah, 2015). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Willy (2020), Fikri dan Mardani (2021) menemukan bahwa pajak hotel berpengaruh positif signifikan terhadap PAD.

H1: Pajak hotel berpengaruh positif signifikan terhadap PAD

Hubungan PDRB Mamin terhadap PAD

Menurut BPS (2023) PDRB terbagi dalam 3 pendekatan yaitu pendekatan produksi, pendapatan, dan pengeluaran. Dalam penelitian ini PDRB yang digunakan adalah PDRB sektoral yaitu melalui pendekatan produksi dimana bisa diukur melalui sektor-sektor usaha yang terdapat di setiap daerah. Menurut Nastiti Utami & Ragil Haryanto (2015), sektor akomodasi adalah salah satu elemen yang mendukung kegiatan pariwisata dimana akomodasi yang dapat dipersiapkan adalah penginapan dan restoran. Sehingga sektor PDRB yang berkaitan dengan pariwisata adalah PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum. Sehingga apabila sektor pariwisata meningkat maka akan menambah usaha dalam bidang penyediaan akomodasi dan makan minum maka penerimaan PAD dapat disumbang dari meningkatnya penerimaan PDRB mamin (Ani et al., 2018). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ariyani (2018) dan Juliansyah (2018) menemukan bahwa PDRB sektoral berpengaruh terhadap PAD.

H2: PDRB mamin berpengaruh positif terhadap PAD

Hubungan THH terhadap PAD

Salah satu aspek dari sektor pariwisata yang mampu meningkatkan penerimaan PAD adalah tingkat hunian hotel. Dimana tingkat hunian hotel adalah jumlah kamar hotel yang terjual dibandingkan dengan jumlah seluruh kamar hotel yang tersedia (Sabrina & Mudzhalifah, 2018). Sehingga semakin banyak kamar hotel yang terjual akan mempengaruhi penerimaan pajak hotel sehingga dapat meningkatkan penerimaan PAD (Hurriati, 2022). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Suastika & Yasa (2015), Hurriati (2022) menemukan bahwa Tingkat Hunian Hotel berpengaruh positif terhadap PAD.

H3: Tingkat hunian hotel berpengaruh terhadap PAD

Hubungan Jumlah Wisatawan terhadap PAD

Tidak terbatasnya jumlah sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia menjadikan Indonesia dilirik oleh penduduk dunia sehingga setiap daerah di Indonesia dapat mengundang wisatawan yang berkunjung untuk melakukan kegiatan pariwisata (Willy, 2020). Dengan jumlah wisatawan yang berkunjung semakin meningkat maka akan memberikan pengaruh untuk perkembangan industri pariwisata. Alokasi dana yang didapatkan oleh setiap daerah menjadikan sektor pariwisata dapat memaksimalkan agar tempat wisata memperoleh banyak pengunjung wisatawan. Maka dari itu, banyaknya wisatawan yang berkunjung akan berpotensi untuk meningkatkan penerimaan PAD (Suastika & Yasa, 2015). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hurriati (2022) dan Tobing (2021) menemukan bahwa jumlah wisatawan berpengaruh positif terhadap PAD.

H4: Jumlah wisatawan berpengaruh positif terhadap PAD

METODE

Penelitian ini akan menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif serta menggunakan data sekunder. Data sekunder akan meliputi data keuangan berupa realisasi penerimaan pajak hotel, penerimaan PDRB di sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, tingkat hunian hotel, jumlah wisatawan, penerimaan PAD pada wilayah Malang Raya tahun 2010—2020. Data sekunder yang akan digunakan untuk penelitian ini diperoleh dari data internal Bapenda Kota Batu, BPS Kabupaten Malang, dan BPS Kota Malang. Semua data akan melalui pengolahan menggunakan aplikasi Eviews 10.0. Teknik analisis dalam penelitian ini adalah model data panel dimana data panel adalah penggabungan dari data yang memiliki tipe *cross-section* dan *time series*. Teknis analisis pada penelitian ini akan dilakukan dengan pendekatan FEM dan CEM. REM tidak dapat dilakukan karena syarat dari dilakukan

pendekatan REM adalah jumlah *cross section* harus lebih besar daripada jumlah variabel penelitian (Silalahi et al., 2014) sedangkan pada penelitian ini jumlah data *cross section* adalah tiga yaitu Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang dan jumlah variabel penelitian adalah lima.

Sehingga analisis pemilihan model hanya melakukan Uji Chow. Lalu melakukan uji asumsi klasik dengan melakukan Uji Multikolinearitas, Uji Heterokedastisitas, dan Uji Hipotesis dengan menggunakan Uji F, Uji T, dan Koefisien Determinasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Hasil Estimasi *Common Effect*

Variabel	Koefisien	Standar Error	t-Statistik	Probabilitas
Constan	-3.70	(669)	-5.53	0.000
Pajak Hotel	-10.09	(1.50)	-6.72	0.000 ***
PDRB Mamin	349.55	(33.86)	11.8	0.000 ***
Tingkat Hunian Hotel	247	(119)	2.06	0.048 ***
Jumlah Wisatawan	18.94	(7.37)	2.56	0.015 ***
R ²				0.888
F-Statistik				0.872

Catatan: *** menunjukkan signifikansi pada level 0.05
 Sumber: Hasil Olahan Eviews 10.0

Hasil Analisis Data

Tabel 1 menunjukkan hasil estimasi dari *common effect* yang menunjukkan angka koefisien dan standart error dari masing-masing variabel independen serta besaran R2 dan F-Statistik. Berdasarkan tabel 1, model regresi data panel untuk CEM dapat

diperkirakan dengan persamaan $Y = -3.70 - 10.09X_1 + 349.55X_2 + 247X_3 + 18.94X_4$.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinearitas

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

	X ₁	X ₂	X ₃	X ₄	D ₅
X ₁	1	0.737	0.290	0.222	-0.015
X ₂	0.737	1	0.062	0.416	-0.213
X ₃	0.290	0.062	1	-0.003	0.594
X ₄	0.222	0.416	-0.003	1	0.281
D ₅	-0.015	-0.213	0.594	0.281	1

Sumber: Hasil Olahan Eviews 10.0

Tabel 2 menyimpulkan bahwa koefisien korelasi antar variabel independen dan variabel

dummy kurang dari 0.8 maka tidak terdapat gejala multikolinearitas.

Uji Heterokedastisitas

Dalam uji heterokedastisitas dilakukan untuk melihat apakah ada atau tidak penyelewengan asumsi klasik. Heterokedastisitas adalah pengujian untuk melihat adanya ketidaksamaan varian dari residual bagi

seluruh pengamatan dalam model regresi. Dengan ketentuan nilai probabilitas < 0.05 maka terdapat heterokedastisitas dan sebaliknya apabila nilai probabilitas > 0.05 tidak terdapat gejala heterokedastisitas dan uji heterokedastisitas dilakukan dengan

menggunakan metode White Test. Hasil dari uji heterokedastisitas dengan uji white menunjukkan hasil Obs^*R^2 adalah 9.653 dimana $9.653 > 0.05$ maka pada penelitian ini tidak terhadapat heterokedastisitas.

Pengujian Hipotesis

Uji t-statistic

Uji t-statistic akan menjelaskan seberapa jauh pengaruh variabel bebas secara individual terhadap variabel terikat dengan melihat nilai t hitung, t-tabel, dan nilai signifikansi. Nilai positif pada t-hitung memperlihatkan arah hubungan variabel X terhadap variabel Y begitu pula sebaliknya. Nilai t-tabel pada penelitian ini didapatkan sebesar 2.04.

Pajak hotel memiliki nilai t-hitung -6.72 dengan signifikansi 0.00. H1 diterima, jadi dapat ditarik kesimpulan yaitu pajak hotel berpengaruh secara signifikan terhadap PAD Malang Raya. Nilai t negatif menunjukkan adanya pengaruh pajak hotel terhadap PAD yang berlawanan atau berbanding terbalik, artinya jika pajak hotel mengalami kenaikan maka besaran PAD akan turun.

PDRB Mamin memiliki nilai t-hitung 11.8 dengan signifikansi 0.00. H2 diterima, jadi dapat disimpulkan PDRB mamin berdampak signifikan terhadap PAD Malang Raya. Nilai t yang positif memperlihatkan pengaruh PDRB Mamin terhadap PAD adalah linier jadi apabila PDRB Mamin meningkat maka PAD akan mengalami peningkatan.

Tingkat hunian hotel memiliki nilai t-hitung 2.06 dengan signifikansi 0.048. H3 diterima, artinya tingkat hunian hotel berpengaruh secara signifikan terhadap PAD Malang Raya. Nilai t yang positif menunjukkan bahwa pengaruh tingkat hunian hotel terhadap PAD adalah linier dimana apabila tingkat hunian hotel mengalami kenaikan maka PAD juga akan meningkat, dan sebaliknya.

Jumlah wisatawan mempunyai nilai t-hitung 2.56 dengan signifikansi 0.015. H4 diterima, jadi kesimpulannya adalah jumlah wisatawan memiliki pengaruh secara signifikan terhadap PAD Malang Raya. Nilai t yang positif berarti bahwa pengaruh jumlah wisatawan terhadap PAD adalah linier, apabila jumlah wisatawan mengalami peningkatan maka PAD mengalami kenaikan pula.

Uji F-statistic

Berdasarkan hasil pengolahan didapatkan nilai F-hitung adalah 55.71 dimana nilai tersebut lebih besar dari 2.71 sehingga dapat disimpulkan bahwa Pajak Hotel, PDRB Sektoral, Tingkat Hunian Hotel, Jumlah Wisatawan secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap PAD Malang Raya.

Koefisien Determinasi

Berdasarkan tabel 1 memperlihatkan nilai R² sebesar 0.888 yang berarti bahwa PAD Malang Raya sebesar 88.8 persen dipengaruhi oleh Pajak Hotel, PDRB Mamin, Tingkat Hunian Hotel, Jumlah Wisatawan. Sedangkan sisanya 11.2 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang terdapat di luar model.

Hubungan antar Variabel X dan Y

Pengaruh Pajak Hotel terhadap PAD

Hasil uji statistik membuktikan bahwa nilai Pajak Hotel (X1) memiliki koefisien -10.09 dengan signifikansi 0.000 yang berarti lebih dari 0.05. Angka ini menyimpulkan bahwa pajak hotel dan PAD memiliki hubungan yang negatif namun pajak hotel memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD. Hubungan kedua variabel tersebut tidak searah, apabila nilai pajak hotel meningkat maka PAD akan mengarah pada penurunan dan juga sebaliknya. Hal ini terjadi karena adanya ketidakefektifan dalam proses pemungutan pajak hotel yang dapat disebabkan karena tingkat kejujuran wajib pajak yang masih rendah maupun data pajak yang tidak valid (Primahadi & Kurniawan, 2021). Hasil penelitian ini juga searah dengan penelitian yang dilakukan Titania & Rahmawati (2022) dimana penelitian memperoleh hasil bahwa pajak hotel berpengaruh terhadap PAD dengan arah hubungan negatif. Berdasarkan data yang tersedia, penerimaan pajak hotel di Malang Raya relatif mengalami kenaikan mulai tahun 2010—2019 tetapi pada tahun 2020 penerimaan pajak hotel mengalami penurunan hal ini disebabkan terjadinya pandemi covid-19. Dalam penelitian Amin & Yunita (2022) dijelaskan bahwa pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan PPKM pada saat kasus virus covid-19 semakin meningkat di tahun 2020 sehingga dengan adanya kebijakan tersebut pemerintah menghimbau untuk tidak datang ke tempat keramaian. Maka dari itu,

kebijakan PPKM berimbas kepada sektor pariwisata di Malang Raya dan mengakibatkan dampak langsung terhadap sektor hotel sehingga pada tahun 2020 yaitu masa awal pandemi covid-19 penerimaan pajak hotel turun.

Pengaruh PDRB Mamin terhadap PAD

Hasil uji statistic pada variabel X2 yaitu PDRB Mamin menunjukkan nilai koefisien 349.55 dengan signifikansi 0.000. Angka tersebut memiliki arti bahwa PDRB berpengaruh terhadap PAD dengan arah hubungan yang positif. Hubungan tersebut merupakan hubungan yang searah akibatnya semakin baik perolehan PDRB Mamin akan berbanding lurus dengan peningkatan PAD di Malang Raya. Hal ini dinyatakan dengan alasan semakin banyak jumlah PDRB mamin maka jumlah PAD juga akan mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh peningkatan dalam sektor pariwisata di Malang Raya secara otomatis akan mengundang jumlah wisatawan yang datang untuk menikmati penyediaan-penyediaan akomodasi hiburan di Malang Raya maka dengan begitu akan menambah nilai PDRB di sektor pariwisata. Hasil penelitian Arraniry (2018), Kapang et al. (2019), dan Ariyani et al. (2018) juga sejalan dengan penelitian ini. Sesuai dengan data pada BPS, PDRB mamin di ketiga daerah Malang Raya juga mengalami penurunan di masa awal pandemi covid-19 yaitu pada tahun 2020 hal ini disebabkan karena penurunan UMKM pada sektor akomodasi dan makan minum (Andriyani & Salam, 2022).

Pengaruh Tingkat Hunian Hotel terhadap PAD

Hasil uji statistik pada variabel X3 menunjukkan angka koefisien 247 dengan signifikansi 0.048, hal ini mengartikan bahwa tingkat hunian hotel memiliki pengaruh terhadap PAD di Malang Raya. Secara teori apabila tingkat hunian hotel tinggi maka akan semakin tinggi pula peluang untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar dari usaha akomodasi (Sari & Yuliarmi, 2018) dan apabila tingkat hunian hotel mengalami peningkatan secara otomatis akan berpengaruh

pada kenaikan pajak hotel yang dibayarkan untuk meningkatkan besaran PAD (Asmynendar et al., 2021). Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suastika & Yasa (2015). Seperti halnya pajak hotel yang mengalami penurunan di tahun 2020, tingkat hunian hotel pun mengalami hal yang sama di tahun 2020. Pada penelitian Fadilla & Wafiroh (2022) disebutkan bahwa pada saat pandemi covid-19, tingkat hunian hotel di Indonesia hanya sedikit. Fenomena tersebut juga terjadi di ketiga daerah di Malang Raya. Jumlah wisatawan yang berkurang mengakibatkan sektor akomodasi hotel juga mengalami pengurangan pengunjung sehingga jumlah kamar hotel yang terjual juga menurun sehingga nilai tingkat hunian hotel pada tahun 2020 kecil dibandingkan dengan tahun 2010—2019.

Pengaruh Jumlah Wisatawan terhadap PAD

Uji statistik pada X4 menghasilkan nilai koefisien 18.94 dan nilai signifikansi 0.015 dimana 0.015 kurang dari 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah wisatawan berpengaruh terhadap PAD dengan arah hubungan positif. Jadi, apabila jumlah wisatawan meningkat maka akan meningkatkan penerimaan PAD Malang Raya. Jumlah wisatawan adalah faktor yang memengaruhi peningkatan dalam sektor pariwisata dengan banyaknya jumlah wisatawan maka akan mendukung kenaikan penerimaan PAD melalui pajak hiburan dan pajak hotel (Wadjudje et al., 2018). Suastika & Yasa (2015) dan Dewi et al. (2020) juga melakukan penelitian dimana hasil searah dengan penelitian ini. Namun, pada tahun 2020 jumlah wisatawan di tiga daerah Malang Raya juga mengalami penurunan. Terjadinya pandemi covid-19 mengakibatkan penutupan sementara tempat-tempat wisata di Indonesia tidak terkecuali di Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang. Hal ini dilakukan guna mengurangi penyebaran virus covid-19. Dengan begitu, penurunan jumlah wisatawan Malang Raya di tahun 2020 berdampak negatif pada penerimaan PAD yang didapatkan dari sektor-sektor pariwisata.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana pengaruh pajak hotel, PDRB sektoral, tingkat hunian hotel, jumlah wisatawan, dan pandemi covid-19 terhadap PAD di Malang Raya pada tahun 2010—2020. Dengan metode penelitian yaitu analisis regresi dengan menggunakan data panel di tiga daerah di Malang Raya yaitu Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Pajak Hotel berpengaruh terhadap PAD dengan arah hubungan negatif, PDRB Mamin berpengaruh terhadap PAD dengan arah hubungan positif, Tingkat Hunian Hotel berpengaruh positif terhadap PAD Jumlah Wisatawan berpengaruh positif terhadap PAD, dan dengan terjadinya Pandemi Covid-19 di tahun 2020 mengakibatkan penurunan terhadap pajak hotel, PDRB mamin, tingkat hunian hotel, jumlah wisatawan, serta PAD di Malang Raya.

Saran

Setiap pemerintah kota dan pemerintah kabupaten memiliki strategi dan upaya dalam bertahan di era pandemi covid-19 salsah satunya dengan menerapkan protokol kesehatan berbasis CHSE sehingga tetap dapat menarik wisatawan untuk berkunjung ke Malang Raya dan dapat melakukan perjalanan wisata dengan aman sehingga hal tersebut mampu untuk memulihkan kondisi PAD Malang Raya sedikit demi sedikit. Untuk kedepannya diharapkan pemerintah Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang terus mendorong sektor akomodasi dan makan minum untuk mampu memanfaatkan teknologi yang ada untuk mempromosikan sektor tersebut agar dapat meningkatkan kembali sektor pariwisata sehingga pemulihan ekonomi bisa tercapai.

IMPLIKASI

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau penambahan literatur untuk kajian penelitian selanjutnya. Serta penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan untuk pemerintah daerah Malang Raya dalam upaya meningkatkan PAD di Malang Raya dan untuk

memaksimalkan potensi pariwisata dengan baik.

KETERBATASAN PENELITIAN

Keterbatasan pada penelitian ini adalah tidak dapatnya dilakukan estimasi model *random effect* karena jumlah data pada *cross section* lebih sedikit dari jumlah seluruh variabel dalam penelitian. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melihat lebih lanjut mengenai potensi selain sektor pariwisata yang dapat meningkatkan penerimaan PAD di Malang Raya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, E. (2018). Pengaruh PDRB dan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Merangin. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 8(2), 1–6.
- Amin, M. A. N., & Yunita, E. A. (2022). Analisis potensi pajak hotel dan pajak restoran Kabupaten Tegal di tengah pandemi covid-19. *Inovasi*, 18(2), 232–240. <https://doi.org/10.30872/jinv.v18i2.10551>
- Andriyani, N., & Salam, A. N. (2022). Analisis pengaruh industri pariwisata terhadap PDRB Jawa Tengah era pandemi covid-19. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 2(1), 1–9. <https://doi.org/10.53088/jerps.v2i1.376>
- Ani, Priyagus, & Erwin, K. (2018). Pengaruh jumlah kunjungan wisatawan dan produk domestik regional bruto penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman (JIEM)*, 3(1).
- Ariyani, A., Yetti, F., & Lastiningsih, N. (2018). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Penduduk, dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Jurnal Wahana Akuntansi*, 13(1), 58–69. <https://doi.org/10.21009/wahana.13.015>
- Arraniry, F. (2018). Analisis Pengaruh Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Universitas Islam Indonesia*, 1–79.

- Asmynendar, D. I., Marseto, M., & Sishadiyati, S. (2021). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Tingkat Hunian Hotel, dan Jumlah Wisatawan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Batu. *Al-Buhuts*, 17(2), 276–291. <https://doi.org/10.30603/ab.v17i2.2280>
- Azhari, A. K., & Negoro, A. H. S. (2020). Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Di Negara Kesatuan Republik Indonesia (R. Tegar & Kamilia Sukmawati (eds.); 2nd ed.). Intrans Publishing Malang.
- Biringkanae, A., & Tammu, R. G. (2021). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Toraja. *Public Administration Journal*, 4(1).
- Dewi, D. S., & Bendesa, I. K. G. (2016). Analisis Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, PDRB Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gianyar. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 5(2), 260–275.
- Dewi, D. L., Indrawati, L. R., & Septiani, Y. (2020). Analisis Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Jumlah Objek Wisata, Jumlah Hotel, dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018. *DINAMIC: Directory Journal of Economic Volume*, 2(3), 647–658.
- Fadilla, H. N., & Wafiroh, N. L. (2022). Perbandingan Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Masa Pandemi Covid-19 Dan New Normal. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 11(1), 78–89. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v11i1.590>
- Fikri, Z., & Mardani, R. M. (2017). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Batu Tahun 2012 - 2016). *E-Jurnal Riset Manajemen Fakultas Ekonomi Unisma*, 6(2), 84–98.
- Horota, P., Riani, I. A. P., & Marbun, R. (2017). Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah Melalui Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Jayapura. *Jurnal Keuda*, 2(1), 1–10.
- Hurriati, L. (2022). The Effect Of The Number Of Tourists And Hotel Room Occupation Levels On Regional Original Income (PAD) In Mataram City. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 3(3), 1712–1716. <http://journal.yrpioku.com/index.php/msej>
- Husna, U. (2015). Pengaruh PDRB, Inflasi, Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota SeJawa Tengah. 1–61.
- Ishar, A. (2019). Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sinjai. 5(001), 515–527.
- Juliansyah, H., & Sulkadria. (2018). Pengaruh Total Penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Simeulue. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 01(02), 58–64. http://ojs.unimal.ac.id/index.php/ekonomi_regional
- Kapang, S., Rorong, I. P., & Maramis, M. (2019). Analisis Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(04), 84–94.
- Khoir, F., Ani, H. M., & Hartanto, W. (2018). Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011-2017. *Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 12(2), 199. <https://doi.org/10.19184/jpe.v12i2.8320>
- Kuncoro, M. (2010). *Dasar-dasar Ekonomika Pembangunan (UPP STIM YKPN (ed.); 5th ed.)*.
- Lasmini, & Astuti, W. (2019). Pengaruh Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman Tahun 2015-2016. *Ebbank*, 10(1), 29–40. <http://ebbank.stiebbank.ac.id/index.php/EBBANK/article/view/153>
- Lina, N. (2017). Pengaruh Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Kpntribusi Pajak Daerah

- Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus : Kabupaten/Kota di Provinsi D.I.Yogyakarta Tahun 2005-2015). Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Marita, N. M., & Saurdana, K. A. (2019). Pengaruh Pajak Daerah Pada Pendapatan Asli Daerah Di Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(1), 53–65.
- Murib, D., Koleangan, R. A. M., & Tolosang, K. D. (2018). Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendapatan Perkapita, PDRB Terhadap PAD di Kabupaten Mimika Provinsi Papua. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(01), 23–33.
- Nooraini, A., Afif, &, & Yahya, S. (2018). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Provinsi Jawa Timur). *Jurnal Ekonomi & Keuangan Publik*, 5(2), 89–104.
<https://ejournal.ipdn.ac.id/JEKP/article/view/416>
- Pratiwi, D. A., & Widyatmoko, T. (2019). The Development of Malang Raya Tourism Bilingual Catalog. 1(1), 1–11.
- Primahadi, R., & Kurniawan, R. (2021). Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Serta Tingkat Kemandirian Daerah Kota Pariaman. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(1), 84.
<https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i1.312>
- Ramdani, D., Darmansyah, & Ahmar, N. (2021). Analisis Pengaruh PDRB, Belanja Modal, Jumlah Penduduk, dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Wilayah Provinsi Jawa Barat. 4(1), 312–326.
- Rochimah, S. (2015). Pengaruh Pajak Hotel & Restoran, Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 – 2012. 3, 1–5.
- Rosidin, U. (2019). Otonomi Daerah dan Desentralisasi (Pustaka Setia (ed.); 2nd ed.). Pustaka Setia Bandung.
- Sabrina, N., & Mudzhalifah, I. (2018). Pengaruh Jumlah Objek Wisata, Jumlah Wisatawan Dan Tingkat Hunian Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dengan Penerimaan Sektor Pariwisata Sebagai Variabel Moderating Pada Dinas Pariwisata Kota Palembang. *BALANCE Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 3(2), 464.
<https://doi.org/10.32502/jab.v3i2.1449>
- Sari, S. P., & Yuliarmi, N. N. (2018). Pengaruh Kunjungan Wisatawan, Lama Tinggal, Tingkat Hunian, Dan Jumlah Objek Wisata Terhadap PAD Kabupaten Karangasem. *E-Jurnal EP Unud*, 7[6]:(1304), 1282–1310.
- Sihombing, H. (2020). Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Journal of Economics and Business*, 1(2), 65–75.
<https://doi.org/10.36655/jeb.v1i2.210>
- Simanjuntak, H., Rahman, A., & Tantrika, C. F. M. (2016). Pemetaan Potensi Pariwisata di Malang Raya dengan K-Means Cluster Analysis. In *Jurnal Rekayasa dan Manajemen Sistem Industri* (Vol. 4, Issue 10).
- Suastika, I. G. Y., & Yasa, I. N. M. (2015). Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Lama Tinggal Wisatawan dan Tingkat Hunian Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 1332–1362.
- Titania, E. B., & Rahmawati, I. D. (2022). The Effect of Hotel Tax and Restaurant Tax on Local Own-Source Revenue (PAD). 19, 1–6.
- Tobing, M. (2021). Pengaruh Jumlah Obyek Wisata, Tingkat Penghunian Kamar, Dan Jumlah Kunjungan Wisatawan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Simalungun. *Jurnal Ekuilnomi*, 3(2), 127–139.
<https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v3i2.263>
- Weni, S., & Anwar, K. (2019). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap

- Pengeluaran Pemerintah di Indonesia Tahun 2014-2018. VIII, 1–8.
- Widiyanti, N., & Dewanti, S. (2017). Analisis Pengaruh Jumlah Obyek Wisata, PDRB, Jumlah Hotel, Jumlah Restoran dan Rumah Makan, Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2015. 1, 101–109.
- Willy, S. (2020). Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perbankan*, 14(2), 320–326.
- Wulandari, P. A., & Iryanie, E. (2017). *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah* (Deepublish (ed.); 1st ed.). Deepublish.